



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KATIMAN
2. Jabatan : ASISTEN DEPUTI RISET, TEKNOLOGI, DAN KEMITRAAN INDUSTRI
3. NHK : 897085

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.390.370.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. Tanah Seluas 1.569 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
7. Tanah Seluas 3.195 m² di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 65.100.000
8. Tanah Seluas 1.725 m² di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 40.150.000
9. Tanah Seluas 2.580 m² di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 60.120.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 273.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.763.354

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.700.133.354

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.700.133.354

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.